

## HAMBATAN DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Oleh:  
**Sugi Rahayu**  
FISE UNY

### Abstrak

Artikel berdasarkan penelitian dengan judul sama. bersifat eksploratori bertujuan mengetahui hambatan yang dihadapi dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PSPAP) dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan bagaimana mengatasi hambatan yang ada.

Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini dosen PSPAP FIS UNY dan menurut data per 30 Desember 2004 adalah 17 orang. Subyek penelitian 16 orang karena salah seorang dosen menjadi peneliti disebut penelitian populasi. Teknik pengumpulan data (1) kuesioner, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Instrumen penelitian disusun untuk mengungkap fakta, dilakukan uji coba dan analisis instrumen. Validasi instrumen melalui seminar. Data dianalisis menggunakan persentase dan tabulasi.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) dosen PSPAP mengajar mendasarkan KBK berorientasi pada hasil (*Learning Outcomes*) yang beragam, menggunakan sumber belajar dan metodologi bervariasi, penilaian menekankan proses serta hasil sebagai upaya pencapaian kompetensi. 2) ada dosen PSPAP dalam implementasi KBK, baik menyangkut penyusunan silabus, kegiatan pembelajaran, maupun dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran; 3) untuk mengeliminasi hambatan dalam KBK antara lain penyusunan silabus perlu *sanctioning* dan *sharing ideas*, kegiatan pembelajaran menggunakan metode bervariasi, membuat media, menanamkan nilai-nilai afektif, dan memu-takhirkan silabus

Kata Kunci : Implementasi KBK, Hambatan Dosen

### A. Pendahuluan

Gencarnya isu tentang menurunnya kualitas hasil pendidikan di se-

kolah, kesalahan cenderung dialamatkan kepada guru terutama mengenai kualitas guru yang rendah.

*Hambatan Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran  
Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Sugi Rahayu)*

sugi\_rahayu@uny.ac.id

Di antara sekian banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, gurulah yang dianggap paling dominan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak terlepas dari tuduhan terhadap kesalahan itu. Hal ini dapat dimengerti karena LPTK adalah lembaga yang bertugas menyiapkan guru. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang meskipun telah mendapatkan *wider mandate* namun tetap memiliki komitmen terhadap fungsinya sebagai LPTK. Sebagai LPTK, UNY dengan seluruh jajarannya mempunyai tanggung jawab menyiapkan guru yang profesional dan kompeten.

Untuk menyiapkan guru yang profesional, UNY telah melakukan berbagai upaya baik berkaitan dengan kualitas masukan, perbaikan kurikulum, pemutakhiran silabi, pengembangan sumberdaya manusia, maupun berbagai kegiatan pengembangan lainnya. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PSPAP) sebagai bagian (sub sistem) UNY bertugas menyiapkan guru bidang studi Administrasi Perkantoran di sekolah menengah tidak ketinggalan selalu mengikuti laju perkembangan di bidangnya dalam menyiapkan lulusannya agar menjadi guru yang profesional. Untuk itu berbagai pembenahan baik secara internal maupun eksternal dilakukan.

Kurikulum sebagai program pembelajaran pun mendapatkan per-

hatian yang sangat serius. Hal ini terbukti hanya dalam kurun waktu 12 tahun sejak diberlakukannya Kurikulum 1992, Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY termasuk di dalamnya Kurikulum PSPAP mengalami perbagai penyempurnaan yaitu dengan Kurikulum 1995, Kurikulum 1997, Kurikulum 2000, dan Kurikulum 2002 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai diberlakukan sejak tahun akademik 2004/2005. Secara sekilas muncul kesan terlalu seringnya ada pergantian kurikulum, di sisi lain kurikulum harus dinamis dalam arti mampu menyesuaikan diri dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Disadari bahwa perubahan tersebut tentunya memiliki implikasi terhadap berbagai unsur pendidikan lainnya.

Dalam menyiapkan guru yang profesional di bidang Administrasi Perkantoran, maka PSPAP harus membekali mahasiswanya dengan berbagai kemampuan yaitu baik menyangkut materi bidang studi maupun ketrampilan mengajar yang meliputi kemampuan merencanakan program pembelajaran, memilih metode mengajar yang tepat, menilai hasil belajar, dsbnya. Mengingat tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga mentransfer nilai, maka pada diri mahasiswa sebagai calon guru harus ditumbuhkan kemauan dan si-

kap profesionalnya seperti jujur, terbuka, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk kepentingan pendidikan.

Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan dan wahana untuk mencapai upaya strategis tersebut. Dalam Kurikulum PSPAP hal tersebut tercermin dalam matakuliah yang dikelompokkan menjadi: (1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), (2) Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), (3) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), (4) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Disebutkan bahwa Kurikulum PSPAP FIS yang berlaku saat ini adalah Kurikulum 2002 atau dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini di FIS diberlakukan mulai tahun akademik 2004/2005. Implementasi KBK di FIS terlambat satu tahun dibandingkan dengan Fakultas lain di UNY yang memulai pemberlakuannya pada tahun akademik 2003/2004. Mengingat karakteristik KBK yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih menitik beratkan pada pencapaian atau pembentukan kompetensi peserta didik, maka dalam operasionalisasinya kurikulum ini membutuhkan berbagai daya dukung yang meliputi ke-siapan sejumlah perangkat pendukung,

sarana pendukung yang memenuhi standar persyaratan, dan kegiatan akademik dan non akademik yang harus terkoordinasi dengan baik.

Mengingat implementasi KBK di Fakultas Ilmu Sosial UNY masih baru yaitu baru satu semester berjalan, maka perlu diketahui hambatan yang dihadapi dosen dalam implementasi kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum merupakan sejumlah kegiatan pelaksanaan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan demikian diperlukan pelaksana kurikulum yang memiliki komitmen dan berkualitas tinggi, dilengkapi sikap proaktif peserta didik dan petugas administrative yang handal sebagai unsure penunjang. Tanpa adanya kerjasama yang sinergis dari ketiga unsur tersebut sulit kiranya untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Hambatan apakah yang dihadapi dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PS-PAP) dalam implementasi KBK? dan (2) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dosen PSPAP dalam implementasi KBK yang mencakup: ke-

siapan pendukung, sarana pendukung, kegiatan akademik dan non akademik dalam implementasi KBK dan bagaimana mengatasi hambatan yang dirasakan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang hambatan yang dihadapi dosen dalam implementasi KBK dan bahan pertimbangan dalam mencari solusi dalam hal terjadi hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik melalui KBK.

## B. Kajian Pustaka

Dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 maka setiap perguruan tinggi harus mengembangkan kurikulumnya berdasarkan kedua keputusan tersebut. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang posisinya sangat strategis. Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus globalisasi telah membawa perubahan di hampir setiap aspek kehidupan.

Dalam rangka menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan yang ditimbulkannya, serta berkembangnya proses demokrasi, otonomi daerah, penegakan hak asasi manusia, dan upaya memposisikan pembelajaran ilmu-ilmu sosial sebagaimana mestinya serta mengemukanya persaingan global, maka sangat diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas.

Peningkatan kualitas SDM antara lain dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem pendidikan. Penyempurnaan kurikulum yang berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk upaya pembaharuan sistem pendidikan.

Perubahan kurikulum yang berbasis kompetensi perlu dilakukan, karena kurikulum yang berlaku selama ini bersifat sentralistik, beban yang terlalu sarat dengan materi, dan cakupan materi yang tumpang tindih (*overlapping*) pada suatu pendidikan yang berbeda. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang seharusnya dipersiapkan oleh setiap perguruan tinggi pada tahun 2002 dan diberlakukan mulai tahun akademik 2003/2004 memerlukan tanggung jawab dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum ini memprioritaskan dimilikinya kompetensi lulusan sehingga berdaya guna dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan masyarakat.

**Kurikulum Berbasis Kompetensi**  
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa dengan penilaian, kegiatan pembelajaran, serta pemberdayaan sumberdaya yang tersedia. KBK dikembangkan dengan prinsip: (1) mampu beradaptasi dengan

berbagai perubahan (berisi prinsip-prinsip pokok, bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan jaman dan IPTEKS), dan (2) pengembangannya melalui proses akreditasi yang memung-kinkan mata pelajaran dimodifikasi (Direktorat Dikmenum, 2003). Dalam hal ini Sardiman menyatakan bahwa KBK merupakan suatu format yang menetapkan apa yang diharapkan da-pat dicapai siswa dalam setiap ting-katan. (2004: 13). Selanjutnya di-jelas-kan, setiap kompetensi menggambar-kan langkah kemajuan siswa menuju kompetensi pada tingkat berikut yang lebih tinggi. Kompetensi dalam hal ini menyangkut berbagai aspek secara total, sehingga para siswa mampu menunjukkan unjuk kerja sesuai de-ngan materi yang dikaji.

Kompetensi merupakan pe-ngetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berikr dan bertindak (Tim Pengembang KBK UNY, 2004). KBK dikembangkan dengan mendudukan kompetensi sebagai acuan dasar. KBK memberikan per-hatian pada hasil dan proses (Sis-kandar, 2004), dalam arti bahwa (1) kurikulum yang berorientasi pada hasil menekankan pada pemaha-man, penghayatan secara kompre-hensif, dan perwujudannya dalam berfikir dan berbuat atau bertindak sebagai dampak pengiringnya; dan (2) kurikulum yang berorientasi pa-da proses menekankan pada ter-

laksananya proses pembelajaran yang dinamis sesuai dengan program yang telolah disusun. Sejalan dengan tuntutan KBK, pembelajarannya perlu dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, kontekstual, dan bermanfaat bagi peserta didik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas.

### **Ciri-Ciri Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK):**

1. Menekankan ketercapaian kompetensi siswa (secara individual maupun klasikal)
2. Berorientasi pada hasil (*Learning Outcomes*) yang beragam.
3. Sumber belajar dan metodologi yang bervariasi (Otonomi Guru).
4. Penilaian menekankan pada proses dan hasil sebagai upaya pencapaian/penguasaan kompetensi. (Direktorat Dikmenum, 2003)

### **Desain Kurikulum**

Perancangan suatu kurikulum bukan hanya memerhatikan tuntutan dan perkembangan disiplin keilmuan saja, melainkan juga perlu memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik seperti: (1) perkembangan fisik dan psikhis, (2) kebermanfaatn dan/atau kepraktmatikan, dan (3) beban belajar yang harus ditanggung oleh peserta didik. Atas dasar

itulah KBK dirancang dengan lebih menitikberatkan pada kemampuan peserta didik dalam membangun pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai/sikap.

Dalam berbagai kepustakaan terdapat banyak desain yang dapat diaplikasikan dalam suatu kurikulum. Penggunaannya dapat dilakukan dengan cara eklektik, yaitu menggunakan dua atau lebih desain dalam kurikulum. KBK menggunakan dua model desain kurikulum (Siskandar, 2004), yaitu:

a. *Academic-subject Design*. Perancangan kurikulum dengan desain seperti itu menitikberatkan pada scope dan sequence disiplin keilmuan yang berdiri sendiri tanpa memerhatikan keterkaitan antara satu dengan lainnya.

b. *Fusion atau Integrated Design*. Perancangan kurikulum dengan desain ini menitikberatkan pada penggabungan atau penyatuan konsep dan generalisasi dari suatu rumpun disiplin keilmuan. Penggabungan konsep dan generalisasi antar disiplin keilmuan memerhatikan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Mengacu pada desain kurikulum kompetensi di atas, standar kompetensi mata pelajaran dalam rumpun Ilmu-ilmu Sosial dirancang melalui kedua model tersebut.

### **Pengembangan KBK**

Pengembangan KBK memiliki kaitan erat dengan teori-teori

pendidikan. Sebab kurikulum disusun dan dikembangkan atas dasar beberapa teori kurikulum dan teori kurikulum diturunkan atau dijabarkan dari teori pendidikan. Dalam hal ini kurikulum dapat dipandang sebagai rencana konkrit penerapan dari teori pendidikan. Ada beberapa teori pendidikan yang terkait erat dengan pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kurikulum, yakni: pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan interaksional, dan teknologi pendidikan.

Dari berbagai teori, pengembangan KBK nampaknya ada kesesuaian dengan teori teknologi pendidikan. Dalam pengembangannya KBK tidak terlepas dari prinsip-prinsip:

1. Keimanan, Nilai, dan Budi Pekerti Luhur
2. Penguatan identitas Nasional
3. Keseimbangan etika, logika, estetika dan kinestika
4. Kesamaan memperoleh kesempatan (pemerataan dan keadilan dalam layanan)
5. Perkembangan informasi dan teknologi
6. Pengembangan *Life Skill*
7. Belajar Sepanjang Hayat
8. *Student Centered Learning*
9. Penilaian Berkelanjutan
10. Pendidikan Partisipatoris (Tim Pengembang KBK UNY, 2004).

## Implementasi KBK

Kurikulum (KBK) merupakan suatu instrument dalam pembelajaran, sedangkan implementasi kurikulum merupakan sejumlah kegiatan pelaksanaan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagai kebijakan baru, KBK perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

Terkait dengan hal itu, Sukamto (2002) mengemukakan sejumlah strategi mendasar yang perlu memperoleh perhatian, yaitu:

1. Bagaimana secara efektif mensosialisasikan konsep dan implementasi KBK
2. Bagaimana secara efektif melaksanakan kendali mutu proses/hasil KBK
3. Bagaimana mengetahui bahwa lulusan telah dapat mencapai kompetensi yang menjadi tujuannya.

Perbedaan orientasi tujuan yang hendak dicapai dapat berakibat pada perbedaan strategi pelaksanaannya di lapangan. Strategi implementasi KBK untuk level perguruan tinggi menurut Sukamto (2002) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan digeser dari *teacher centered* ke *learner centered*.
2. Iklim pembelajaran digeser dari pemaknaan individual ke social (melalui tugas, bhakti masyarakat, KKN, PPL, PI, dan bentuk lain)

3. Tanggung jawab digeser dari dominasi aktivitas dosen ke partisipasi dan aktivitas mahasiswa dengan memanfaatkan *multi resources* dan media teknologi.
4. *Assessment* berbasis *mastery learning*, program remedial, dan *student support*.

## C. Metode Penelitian

Untuk menggali informasi tentang hambatan yang dihadapi dosen PSPAP dalam implementasi KBK dilakukan penelitian survai untuk tujuan eksploratori. Subyek penelitian adalah seluruh dosen PSPAP FIS UNY yang berjumlah 17 orang yang kesemuanya menjadi subyek penelitian sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan: (1) kuesioner, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengungkap hambatan yang dihadapi dosen dalam implementasi KBK dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari dokumen. Validasi instrumen dilakukan melalui seminar. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi dan persentase.

#### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap KBK pada ternyata sebagian besar (87,50 %) dosen PS-PAP menyatakan paham, meskipun tingkat pemahaman mereka belum menyeluruh. Baru dua orang (12,50%) yang benar-benar sudah sangat paham. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian mengingat KBK di FIS UNY sudah satu tahun diberlakukan. Namun demikian ketika ditelusur lebih lanjut ternyata mereka telah berusaha untuk menerapkan KBK dengan menekankan ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun kelompok dalam perkuliahan.

Pemahaman terhadap KBK tentunya sangat diharapkan kepada dosen UNY, mengingat salah satu

fungsi UNY adalah sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang tentunya harus membekali lulusannya dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan hakikat KBK. Untuk itu mereka mengusulkan pada setiap awal semester perlu disegarkan kembali pemahaman mereka terhadap KBK. Apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka pemahaman mereka terhadap KBK akan meningkat sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep, hakikat, dan perbedaan yang nyata dari KBK dengan kurikulum yang berlaku selama ini.

Beberapa hambatan yang dirasakan dosen dalam menerapkan KBK adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 1.

Tabel 1. Hambatan Dosen dalam Menerapkan KBK

Hambatan	Fekuensi	Fekuensi (%)
Kurang waktu	8	50
Pengaturan ruang	4	25
Peralatan (OHP,LCD)	7	43,75
Media belajar	8	50
Metode pembelajaran	4	25
Referensi	7	43,75
Mahasiswa yang pasif	15	94
Lainnya	2	12,50

Tabel 1. menunjukkan bahwa hambatan tertinggi yang dirasakan oleh dosen dalam implementasi KBK adalah disebabkan karena mahasiswa

yang pasif (94%). Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa salah satu ciri KBK adalah *Student Centered Learning*.



Hambatan lain yang banyak dirasakan dosen dalam implementasi KBK adalah waktu (50%) dan media belajar (50%). Dari sisi waktu dan media belajar dalam implementasi KBK dirasakan menjadi hambatan karena pada setiap proses pembelajaran dosen sudah merancang kompetensi yang harus dicapai. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan media belajar yang terbatas tentunya sulit bagi dosen untuk mengukur tingkat kompetensi mahasiswa secara individual. Yang dapat dilakukan adalah mengukur kompetensi secara *sampling* dan atau secara kelompok.

Hambatan terkait dengan prasarana belajar yang mencakup antara lain ketersediaan OHP/LCD, peralatan praktik dan fasilitas laboratorium lainnya dirasakan sebagian dosen (43,75%) sebagai hambatan. Hambatan sangat dirasakan oleh para dosen yang mengampu mata-kuliah yang mengandung unsur praktik, seperti mata-kuliah komputer, praktik perkantoran, mengetik elektronik maupun praktik kearsipan. Hambatan yang dirasakan oleh mereka tidak sekedar ketersediaan peralatan praktik, melainkan juga kelengkapan dan kelayakan fasilitas praktik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PSPAP sudah saatnya untuk dilengkapi dan dimutakhirkan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di bidang perkantoran, PSPAP berusaha

mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Apabila dilihat dari rata-rata jumlah dosen mengajar pada setiap semester maka tersirat bahwa semua dosen PSPAP mengajar matakuliah lebih dari satu, yaitu antara tiga sampai lima matakuliah meskipun ada yang dilaksanakan secara *team teaching*. Ini berarti selain matakuliah pokok, mereka juga mengajar mata kuliah yang lain. Dikaitkan dengan pembuatan silabus, dari sejumlah matakuliah yang diampu ternyata delapan orang (50%) telah menyusun semua silabus dari mata kuliah yang diampu, sisanya delapan orang (50%) baru menyusun silabus untuk matakuliah pokoknya. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa tujuh orang (43%) sudah menyerahkan semua silabus matakuliah yang diampunya ke Program Studi, sedangkan sembilan orang (56,25%) menyerahkan silabus untuk matakuliah pokok yang diampunya. Mengingat silabus adalah desain pembelajaran yang menjadi pegangan dosen dalam mengajar maka semestinya semua dosen yang mengampu matakuliah wajib menyerahkan silabus. Keadaan ini memberikan informasi bahwa PSPAP selama ini belum sepenuhnya berhasil dalam meminta warganya untuk menyelesaikan kewajiban akademiknya.

Dalam menyusun silabus yang mengacu kepada kompetensi,

dosen merasakan adanya bebe-rapa hambatan. Hambatan tersebut adalah

sebagaimana tercermin da-lam tabel 2. berikut.

Tabel 2. Hambatan yang Dirasakan Dosen dalam Menyusun Silabus

No.	Hambatan dalam Menyusun Silabus	Frekuensi	Frekuensi (%)
1.	Merumuskan deskripsi matakuliah	1	12,50
2.	Merumuskan kompetensi mata kuliah	5	31,25
3.	Melakukan analisis instruksional	4	25
4.	Menentukan sumber bahan	6	37,50
5.	Menetapkan komponen penilaian	3	18,75
6.	Mengembangkan kegiatan perkuliahan	3	18,75

Tabel 2. menunjukkan bahwa hambatan terbesar yang dirasakan oleh dosen dalam menyusun silabus adalah menentukan sumber bahan (37,50%) dan merumuskan kompetensi matakuliah (31,25%). Terkait dengan penentuan sumber belajar adalah karena sampai sekarang buku yang benar-benar disusun untuk mendukung implementasi KBK, misalnya buku yang sudah menerapkan model *contextual teaching learning* (CTL), *problem based learning* (PBL), ataupun *integrated learning* (IL) belum semua tersedia. Sedangkan hambatan yang dirasakan dalam menyusun kompetensi matakuliah antara lain mencakup pemahaman konsep yang belum mantap, sulitnya mengakomodasi berbagai kompetensi dasar ke dalam rumusan kompetensi matakuliah, terbatasnya informasi dari pemakai lulusan (dunia kerja) tentang tuntutan kompetensi yang diharapkan, dan adanya pokok bahasan yang sulit

untuk diukur kompetensinya terutama untuk matakuliah tertentu. Dalam menggunakan kata kerja operasional untuk merumuskan kompetensi mata-kuliah sebagian besar dosen (81,25%) tidak menemui hambatan. Ini berarti sebagian besar dosen sudah mampu memilih kata kerja operasional yang terukur (*measurable*). Dalam menyusun silabus, model struktur kompetensi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kompetensi adalah masing-masing dua orang yang menggunakan model hirarkhial dan prosedural, satu orang menggunakan model pengelompokan dan delapan orang menggunakan model kombinasi. Sedangkan tiga orang tidak memberikan jawaban. Ketika dikonfirmasi ternyata mereka belum begitu paham tentang alur kompetensi dasar dalam menyusun kompetensi matakuliah.

Ketika ditanyakan tentang hambatan dalam merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai mahasiswa, 10 orang dosen (62,50%) menyatakan ada hambatan. Hambatan yang dirasakan antara lain adanya pokok bahasan yang sulit dirumuskan kompetensi dasarnya terkait dengan bagaimana mengukurnya, adanya kekhawatiran tidak tercapainya kompetensi dasar karena ketiadaan fasilitas belajar yang mendukung dan keterbatasan waktu, perkembangan IPTEKS yang pesat, dan dalam menentukan kompetensi yang benar-benar dasar.

Dalam hal menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan, hanya tiga (18,75%) dosen yang merasakan ada hambatan. Ketika ditelusur lebih jauh ternyata hal tersebut disebabkan belum adanya buku teks yang standar, matakuliah tersebut baru bagi yang bersangkutan, dan dalam menentukan urutan pokok bahasan. Sedangkan sisanya 13 orang (81,25%) tidak merasakan ada hambatan. Hal ini sesuai dengan temuan terkait dengan lama mengajar dosen (81,25%) yang sudah mencapai lebih dari 11 tahun (lihat tabel 1.).

Untuk mendukung pencapaian kompetensi yang sudah dirancang, semua dosen telah menentukan sumber bahan (referensi) yang digunakan baik wajib maupun anjuran. Buku atau sumber bahan wajib yang mereka tentukan adalah sebagai berikut: enam orang dosen (37,50%)

menentukan satu buku wajib, enam orang (37,50%) dua buku wajib, tiga orang (18,75%) tiga buku wajib, dan ada seorang dosen menentukan enam buku wajib. Sedangkan untuk buku anjuran ada enam dosen (37,50%) yang menentukan dua buku, empat orang dosen (25%) tiga buku, tiga orang dosen (18,75%) empat buku dan tiga orang dosen (18,75%) menyebutkan 10 buku ke atas. Selain buku wajib dan anjuran empat orang dosen (25%) menggunakan hasil penelitian dan jurnal sebagai sumber bahan dan sembilan orang (56,25%) menggunakan majalah, surat kabar, dan internet sebagai sumber bahan. Dalam menentukan sumber bahan 10 orang dosen (62,50%) tidak menemui hambatan sedangkan sisanya enam orang (37,50%) merasakan ada hambatan yaitu terbatasnya sumber bahan (terutama buku teks) yang secara lengkap sesuai dengan kebutuhan sehingga dosen harus mengkompilasi dari berbagai sumber bahan, keterbatasan dana untuk membeli buku baru terutama terbitan asing, mahalannya harga buku, dan sebagainya.

Dalam merumuskan indikator ketercapaian untuk menentukan penguasaan kompetensi dasar mahasiswa, terdapat 10 orang dosen (62,50%) merasakan menemui hambatan dan sisanya enam orang (37,50%) tidak merasa ada ham-

batan. Ketika dicrosscheck melalui wawancara ternyata ada yang merasa belum memahami konsep secara sempurna, kriteria dalam menentukan tingkat ketercapaian, kadang-kadang sulit untuk membedakan antara rumusan untuk kompetensi dan rumusan untuk indikator ketercapaian, indikator ketercapaian untuk kompetensi yang bersifat afektif (*values*) yang bersifat kualitatif sulit untuk dikuantifikasikan, dan dalam mengukur *mastery learning*.

Dalam menentukan materi pokok untuk mencapai kompetensi yang direncanakan hanya ada dua orang (12,50%) yang merasakan ada hambatan yaitu sulitnya mencari konteks pembelajaran yang sesuai untuk membawa mahasiswa kepada pengalaman hidup sehari-hari dan belum tersedianya buku ajar yang benar-benar disusun berdasarkan CTL untuk matakuliah yang diampu. Dalam menyajikan materi perkuliahan, hambatan yang dirasakan adalah menyangkut media pembelajaran sebanyak 10 orang (62,50%) dan tiga orang (18,75%) menyangkut strategi pembelajaran.

Untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi, semua dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa sebagai salah satu bentuk tagihan. Bentuk penugasan adalah mandiri oleh 11 orang dosen (68,75%), terstruktur oleh enam orang (37,50%), tugas kelompok oleh 11 orang dosen (68,75%). Tingkat

penguasaan kompetensi juga dilakukan melalui ujian, selain ujian yang sudah terjadwal yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) ada enam dosen (37,25%) juga menyelenggarakan ujian yang lain, sementara 10 orang dosen yang lain tidak. Dalam menentukan nilai akhir untuk memutuskan kelulusan mahasiswa 11 orang dosen (68,75%) mempertimbangkan tagihan baik berupa tugas maupun portofolio yang sudah dilakukan dan tertulis dalam kontrak antara dosen dan mahasiswa karena tertuang dalam silabus matakuliah. Sisanya lima orang (31,25%) menjawab tidak. Ketika ditanya lebih lanjut hal tersebut disebabkan karena ketatnya waktu penyerahan nilai, banyaknya tagihan yang diberikan, kesempatan koreksi terbatas, banyaknya mahasiswa yang mengambil matakuliah pada suatu semester, dan matakuliah yang diampu lebih dari satu. 11 orang dosen (68,75%) menyatakan nilai kelulusan yang diberikan sudah mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi matakuliah yang diampunya, sedangkan lima orang (31,25%) menyatakan tidak sepenuhnya mencerminkan. Ketika ditelusur alasannya, mereka mengatakan karena sudah berpengalaman dalam menilai, tagihan dan portofolio menunjang penguasaan kompetensi, dan mempertimbangkan

aspek afektif yang ditunjukkan oleh mahasiswa.

Mengenai pendekatan penilaian yang digunakan, sembilan dosen (56,25%) menyatakan menggunakan PAP dan sisanya 43,75% menggunakan PAN. Mereka menggunakan PAN karena mereka ingin mempertimbangkan kedudukan individu dalam kelompok. Dalam KBK tentunya pendekatan penilaian yang tepat adalah menggunakan PAP.

### Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi KBK

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi KBK para dosen PSPAP telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman KBK, para dosen berusaha untuk mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi KBK baik melalui seminar, workshop, pelatihan, mendatangkan nara sumber, maupun membaca.
2. Terkait dengan penyusunan silabus, dosen tanpa segan bertanya kepada yang lebih paham dan mempraktikkannya.
3. Para dosen yang mengampu matakuliah yang berdekatan (sejenis) melakukan diskusi dan *sharing ideas*.
4. Untuk matakuliah yang diampu bersama (*team teaching*) diadakan pembagian tugas yang jelas baik menyangkut penyajian materi, pengujian, dan pe-

meriksaan (koreksi) hasil ujian maupun tugas.

5. Perkuliahan diawali dengan orientasi studi sebagai kontrak kerja antara dosen dengan mahasiswa.
6. Mencari strategi pembelajaran yang menyenangkan (kontekstual) dan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa.
7. Metode pembelajaran bervariasi.
8. Mengaktifkan mahasiswa dengan memberi tugas membaca, *browsing* ke internet, dan ke lapangan.
9. Menciptakan atau membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
10. Menanamkan nilai-nilai afektif kepada mahasiswa. Misalnya memberi contoh tidak terlambat dalam mengajar, memotivasi mahasiswa, menumbuhkan sikap positif mahasiswa, dan lain sebagainya.
11. Menyadarkan mahasiswa bahwa *self discipline* sangat penting untuk mencapai penguasaan kompetensi.
12. Berusaha memutakhirkan sumber bahan.

### D. Penutup

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dosen PSPAP dalam mengimplementasikan KBK pada matakuliah yang diampunya telah mendasarkan ketentuan KBK yaitu

menekankan ketercapaian kompetensi siswa (secara individual maupun klasikal), berorientasi pada hasil (*Learning Outcomes*) yang beragam, menggunakan sumber belajar dan metodologi yang bervariasi, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil sebagai upaya pencapaian/penguasaan kompetensi.

Hambatan yang dirasakan oleh dosen dalam implementasi KBK adalah (1) mahasiswa yang pasif, (2) waktu dan media belajar, (3) dalam merumuskan kompetensi matakuliah karena terbatasnya informasi dari pemakai lulusan (dunia kerja) tentang tuntutan kompetensi yang diharapkan, (4) adanya pokok bahasan yang sulit untuk diukur kompetensinya, dan (5) dalam menentukan materi pokok untuk mencapai kompetensi yang direncanakan.

Upaya yang telah dilakukan dosen PSPAP untuk mengatasi hambatan dalam implementasi KBK antara lain: (a) dalam hal peningkatan pemahaman KBK para dosen berusaha untuk mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi KBK baik melalui seminar, workshop, pelatihan, mendatangkan nara sumber, maupun membaca, (b) dalam penyusunan silabus dilakukan *sanctioning* dan *sharing ideas*, (c) perkuliahan diawali dengan orientasi studi sebagai kontrak kerja antara dosen dengan mahasiswa; (d) Dalam perkuliahan sedapat mungkin mencari strategi pembelajaran yang menyenangkan

(kontekstual) dan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa; (e) Metode pembelajaran bervariasi; (f) mengaktifkan mahasiswa dengan memberi tugas, (g) membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan; (h) menanamkan nilai-nilai afektif kepada mahasiswa, dan (i) berusaha memutakhirkan sumber bahan.

### Daftar Pustaka

- Depdiknas. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Direktorat Dikmenum.
- Mukminan. 2003. Strategi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Ilmu Sosial. *Makalah*: disajikan pada seminar dalam rangka Dies Natalis UNY ke 39, 11 Mei 2003 di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta.
- Mulyasa, E. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sardiman. 2003. Mengenal Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Materi Pelatihan* bagi Guru-Guru SLTP se Kabupaten Kulon Progo.
- Siskandar. 2004. Pengembangan Kurikulum 2004: Rumpun Ilmu-Ilmu Sosial. *Makalah*,

disajikan dalam Seminar Sehari Himpu-nan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial (HISPISI) di Yogya-karta, tanggal 17 April 2004.

Suriani. 2002. Membedah Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, *Makalah*, disajikan dalam Seminar Nasional reorientasi Peran Pendidikan Ilmu Sosial Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, 3 November 2002 di Ambarukmo Palace hotel Yogyakarta.

Tim Pengembang KBK UNY. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Makalah*.

Zamroni. Reorientasi Pengajaran Ilmu-Ilmu Sosial dalam Kaitannya dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Makalah*, disajikan dalam Seminar Nasional reorientasi Peran Pendidikan Ilmu Sosial Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, 3 November 2002 di Ambarukmo Palace hotel Yogyakarta.

#### **Biodata Penulis**

Sugi Rahayu, adalah salah satu staf pengajar pada jurusan Pendidikan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta